

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif .Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fathoni, Mukhamad, Suryadi, and Stefanus Pani Rengu. 2018. "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa." Jurnal Administrasi Publik (JAP) 3(1): 139–46.
- Yuan Ihsan. 2011. Analisis Gaya Kepemimpinan Fauzi Bahar Sebagai Walikota Padang. E.skripsi Universitas Andalas.
- Hariato, Anto. 2014. "Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja." Universitas Sahid.
- Hasan, Erilina. 2010. Komunikasi Pemerintahan Cetaka Kedua. Bandung: Refika Aditama.
- Indah D. Rahayu. 2017. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Motivasi Kerja (Studi pada Karyawan Tetap Maintenance Department PT.Badak LNG Bontang). Jurnal Administrasi Bisnis(JAB) Vol. 43No.1,1-9. Di unduh pada tanggal 19/03/2020.
- Kunandar. 2009. Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Sukses Dalam Setifikasi Guru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro Mudrajad, 2014. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi.Jakarta: Erlangga.
- Kartina.2011. Analisis Gaya kepemimpinan Lurah Batu IX Kecamatan TanjungpinaNG Timur. Jurnal Umrah.
- Lamangida, Trisusanti, Muh Firyal Akbar, and Hasna Hasan. 2017. "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto." Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) 6(1): 68.
- Mulyasa. 2011. Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik; Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
- Rivai, veitzhal dan muyadi, deddy. 2012. kepemimpinan dan perilaku organisasi. jakarta, rajawai pers.
- Rira Nuradhawati. 2015. Kepemimpinan Situasional Kepala Desa Di Desa Baregbeg

Dan Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 15 Nomor 7.

Sukmawati.2010. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Tangerang, Jurnal Digital Library UIN khas Jember.

Salusu J. 2015. Pengambilan Keputusan Strategic. Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofil. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Syam, Irwan. 2018. “Analisis Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto.” Unismuh.Ac,Id 6(1): 1–8.

Torang, Syamsir, 2013, Organisasi dan Manajemen: (Perilaku, Struktur, Budaya, Perubahan Organisasi), Alfabeta, Bandung.

Lamangida, Trisusanti, Muh Firyal Akbar, and Hasna Hasan. 2017. “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto.” Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) 6(1): 68.

Wahab, Solichin Abdul. 2017. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Wirawan. 2013. Kepemimpinan (Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lampiran



KABUPATEN SOPPENG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GANRA
NOMOR : 03/KPTS/DGR/II/2020

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEPALA DESA GANRA

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);


Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

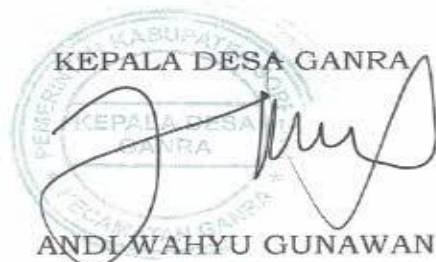
Ditetapkan di : Ganra
pada tanggal : 02 April 2020

KEPALA DESA GANRA

ANDI WAHYU GUNAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GANRA
KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 03/KPTS/DGR/II/2020
TANGGAL : 2 April 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA GANRA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Ganra
2.	PPID	Sekretaris Desa Ganra
3.	Sekretaris	Andi Hadi Saputra,S.Kom,MHi
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Asrar Arsan,S.Pd
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Irwansya
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Alamasyah


KEPALA DESA GANRA
ANDI WAHYU GUNAWAN

DASAR HUKUM PPID DESA GANRA

Dasar Hukum
Administrator 01 April 2021 215 Kali dibuka

Suka 0 Bagikan

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PPID DESA GANRA

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik

ARSIP ARTIKEL

Hari	Mulai	Selesa
Senin	08:00:00	16:00:00
Selasa	08:00:00	16:00:00
Rabu	08:00:00	16:00:00
Kamis	08:00:00	16:00:00
Jumat	08:00:00	16:00:00
Sabtu		Libur
Minggu		Libur

Populer Terbaru

- 488 Kali dibuka Pemerintah Desa...
- 456 Kali dibuka Daftar Perdes Tahun...

TUGAS DAN FUNGSI PPID

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PPID DESA GANRA

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap Unit/Satuan Kerja
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
7. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupannya;
9. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
11. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;

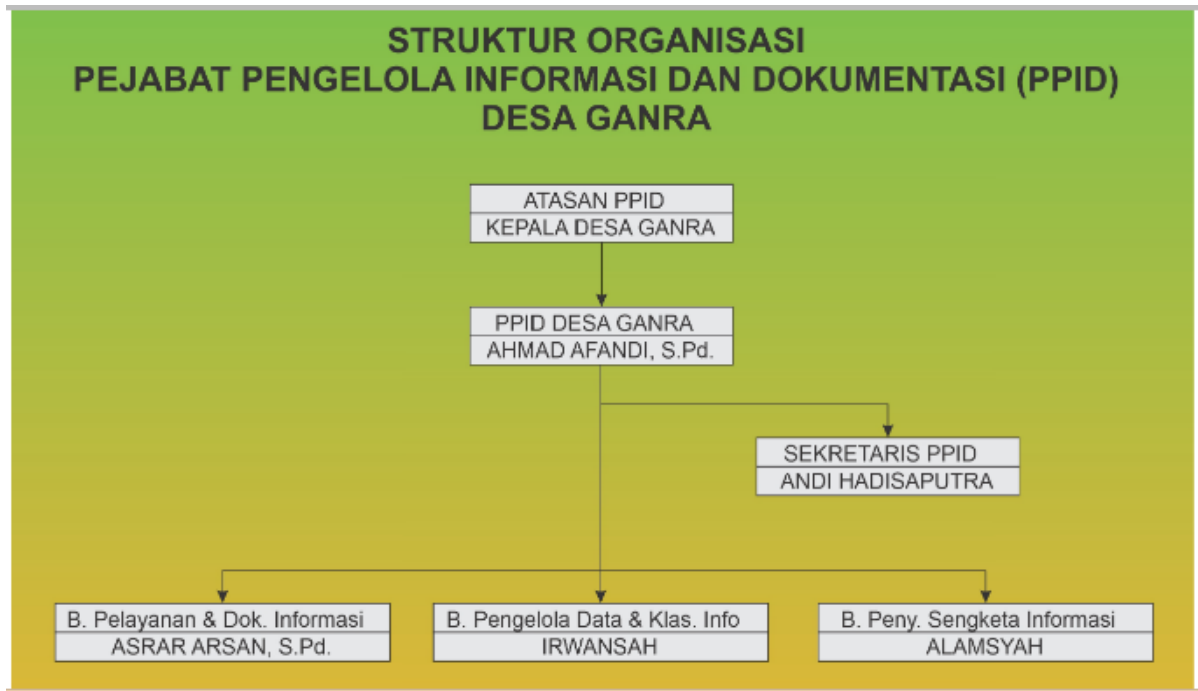
ARSIP ARTIKEL

Rabu	08:00:00	16:00:00
Kamis	08:00:00	16:00:00
Jumat	08:00:00	16:00:00
Sabtu		Libur
Minggu		Libur

Populer Terbaru

- 488 Kali dibuka Pemerintah Desa...
- 456 Kali dibuka Daftar Perdes Tahun 2020...
- 436 Kali dibuka BLT Dana Desa Tahun 2022...
- 413 Kali dibuka Perdes Keterbukaan...

STRUKTUR ORGANISASI PPID



Dokumentasi Penelitian







